Jurnal Mercusuar Volume 1 No 2 Oktober 2020

APLIKASI DAKWAH PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA LAKAWALI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR

Oleh: Abd Jabbar Yusuf[1], Muliyati Amin[2], Kamaluddin Tajibu[3]

Jurusan Dakwah dan Komunikasi
Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar
Email : Abduljb34@gmail.com[1], Muliyati.amin@uin-alauddin.ac.id[2], kamaluddin.tajibu@uin-alauddin.ac.id[3],

Abstrak:

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pengembangan masyarakat islam dengan program keluarga harapan (PKH) (Studi pengembangan masyarakat Islam di Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur). Pokok masalah tersebut dibagi kedalam tiga sub masalah yaitu: 1) Bagaimana bentuk program keluarga harapan (PKH) dalam pengembangan masyarakat Islam di Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur? 2) Bagaimana Aplikasi dakwah pengembangan masyarakat Islam terhadap program keluarga harapan di Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur? 3) Bagaimana urgensi pengembangan masyarakat Islam terhadap program keluarga harapan di Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur?

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi dan pendekatan komunikasi. Adapun sumber data penelitian diperoleh langsung dari masyarakat, instansi, dan pendamping/dai, di Desa lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi serta penelusaran dari berbagai literatur dan referensi. Teknik pengolahan data dan analisis data di lakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk program keluarga harapan dalam pengembangan masyarakat Islam adalah salah satu bentuk pengentasan kemiskinan oleh kementrian sosial agar dapat layak hidup sebagaimana mestinya dimana dalam bentuknya yaitu dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan ekonomi. 2) Aplikasi dakwah yang dilakukan dalam pengembangan masyarakat islam yaitu dengan melakukan kegiatan pertemuan kelompok setiap bulannya guna melihat perkembangan masyarakat tersebut seperti akhlak, prilaku, nilai dan norma-norma agamanya. 3) Urgensi pengembangan masyarakat Islam

dengan program keluarga harapan ialah adanya nilai-nilai agama yang di sampaikan oleh pendamping terhadap masyarakat penerima PKH, baik itu dalam pola kebersihan, akhlak, norma-norma, dan khususnya prilaku untuk tidak boros.

Implikasi penelitian ini adalah 1) pengembangan masyarakat islam melalui program keluarga harapan sampai dengan saat ini sudah cukup efektif yang dilakukan oleh pemerintah, namun sebaiknya dalam pengelolaan data yang selanjutanya haurus lebih baik lagi dan melakukan pendataan sesuai dengan yang benar layak untuk dibantu. 2) Dengan adanya program ini di harapkan agar jangan hanya dibagian pendidikan dan kesehatan saja yang menjadi kategori bantuannya akan tetapi harus juga mempunyai pengembangan lainnya seperti usaha keterampilan yang dimiliki masyarakat.

Keywords: Pengembangan Masyarakat Islam, Aplikasi Dakwah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia dengan jumlah penduduk yang banyak, kemiskinan pun tidak dapat dihindari. Masalah kemiskinan bukan hal asing di negeri ini. Pada umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena pangan yang masih kurang tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.[1]

Kemiskinan sudah menjadi kondisi yang biasa bagi negara berkembang seperti Indonesia, masih banyak rakyatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan dan hidup dalam keadaan yang tidak selayaknya. Bank dunia juga menetapkan bahwa seseorang dianggap miskin jika mereka memiliki pendapatan kurang dari $ 2 perhari.[2]

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah selama ini selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan, karena pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun sampai saat ini masalah kemiskinan terus-menerus menjadi isu yang berkepanjangan.

Banyak program yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang bersifat berkelanjutan, seperti Bantuan Sosial (BANSOS), baik dalam bentuk bantuan tunai maupun material. Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain-lain. Hal ini

[1] Atu Nuri Amin, *Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Terhadap Tingkat Pendapatan di Kota Surabaya*. (Jawa Timur:2010). h. 9.

[2] Edi Suharto, *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2009).

menunjukkan bahwa pemerintah selalu memberikan perhatian dan tanggungjawab terhadap masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan perlindungan sosial dan kesehatan.

Menurut Sahdan, yang dikutip Nano Purwanto banyaknya kegagalan program yang dilakukan pemerintah karena pelaksanaanya terjadi penyimpangan-penyimpangan, seperti Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Program ini di beberapa daerah mengalami kegagalan karena tidak adanya perencanaan matang dan kurangnya transparansi alokasi anggaran kepada masyarakat desa. Kegagalan juga terjadi dalam program Padat Karya Desa – Pengembangan Wilayah Terpadu (PKD-PWT) di Sulawesi Selatan.[3]

Seperti yang di ketahui bahwa beberapa program yang diluncurkan dalam pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan: a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Diketahui Bahwa PNPM Mandiri merupakan Program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksana program- program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program. Kemudian pemberdayaan masyarakat yag dilakukan ialah upaya menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu, maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup kemandirian dan kesejahteraan.[4] b. Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan langsung tunai adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi di tengah naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Bantuan Langsung Tunai adalah merupakan salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial.

Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul "Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia" menjelaskan bahwa bantuan langsung tunai merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatau kebijakan.[5] c. Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Tani merupakan dana yang berasal dari pemerintah. Pemerintah mengalokasikan dana tersebut sebanyak Rp. 5,7 Triliun kepada 14 Bank, dan Bank hanya sebagai penyalur kredit yang diberikan kepada para petani melalui linkage program.

Kita ketahui bahwa KUT ini sudah hampir tidak ada lagi karena adanya penyalahgunaan dana tersebut, dan tak sedikit petani yang sebenarnya tidak meminjam KUT, namun ada orang lain yang menerima KUT menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) petani tersebut. Jadi pemerintah mengambil sikap untuk perbaikan hidup petani dimasa yang akan dating, dengan penghapusan kredit macet agar mereka dapat kembali memperoleh

[3] Nano Prawoto, "MEMAHAMI KEMISKINAN DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA," *Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 9 (2008), https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/issue/view/195. h. 64

[4] "Pengertian Dan Tujuan," 2019, http://www.pnpm-mandiri.org/PengertiandanTujuan.html.

[5] Suharto, *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*, 2009. h. 48

kredit dari perbankan.[6] d. Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Pemerintah berusaha untuk membangun sektor pertanian melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal. Salah satu kebijakan yang telah digulirkan adalah subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Pemerintah bekerjasama dengan bank pelaksana menyediakan KKP-E. Petani diharapkan dapat mengakses KKP-E karena tingkat bunganya lebih rendah dari pasar. KKP-E digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembelian peralatan pertanian dan input usaha taninya. Sejak digulirkan pada tahun 2008 sampai dengan 2015, realisasi penyaluran KKP-E masih jauh di bawah plafon kredit, dan realisasi subsidi bunga tidak efisien pada tahun-tahun awal digulirkannya subsidi bunga KKP-E.

Penelitian ini bermaksud menganalisis secara diskriptif implementasi KKP-E, perspektif usaha tani terhadap KKP-E, dan perubahan KKP-E menjadi KUR (Kredit Usaha Rakyat) sektor pertanian. Data di lapangan menunjukkan bahwa jangkauan KKP-E masih rendah, saluran distribusi KKP-E perlu ditambah, terjadi fungibility penggunaan KKP-E, pinjaman KKP-E belum dapat memenuhi semua kebutuhan usaha tani, dan pencairan KKP-E masih lama dan tidak tepat waktu. Usaha tani menginginkan agar skim kredit dengan subsidi bunga dapat dilanjutkan di masa yang akan datang. Kemudahan-kemudahan yang ada pada KKP-E hendaknya diterapkan pada KUR sektor pertanian. Pemerintah bersama bank pelaksana perlu lebih masif melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang lebih maju dan menyederhanakan birokrasi.[7]

Melihat beberapa program tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan bahwa kemiskinan di Indonesia seakan-akan hanya bisa diberantas oleh program-program "Pemberdayaan" masyarakat dalam arti sempit, pemberdayaan seolah hanya mencakup pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan.[8] Asumsi sederhananya, jika orang-orang miskin diberi modal dan dilatih, maka mereka akan memiliki pekerjaan dan pendapatan. Kehidupan mereka kemudian menjadi lebih baik dan tidak miskin lagi. Asumsi ini telah menjadi keyakinan umum dan bahkan cenderung dianggap kebenaran mutlak. Seperti yang terjadi pada Desa Lakawali dimana problem yang tejadi karena adanya ke tidak sesuaian data yang telah di keluarkan dari kementrian Sosial terhadap penerima yang benar-benar kurang mapu, maka dari itulah alasan saya mengapa saya tertarik meneliti di Desa Lakawali.

Kemudian jika dilihat kondisi di Desa Lakawali bahwa di desa yang kehidupannya sehingga desa tersebut memang masih memerlukan bantuan dari pemerintah agar masyarakat tersebut kemudian dapat hidup sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial.

Salah satu bentuk dalam pemberdayaan Masyarakat Islam adalah melalui Program Keluarga Harapan Yang di keluarkan oleh Kementrian tentang

[6] Nina Dwiantika, "Kredit Usaha Tani Dihapus Bagaimana Nasib BRI," 28 Agustus 2012, 2012, https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-usaha-tani-dihapus-bagaimana-nasib-bri.

[7] Kementerian Pertanian. 2015. Pedoman teknis kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E). Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.Pandula G. 2011. An empirical investigation of small and medium enterprise's access to bank finance. ASBBS Annual Conference Procceding. 18(2).

[8] Edi Suharto, *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*, Cet I (Bandung: Alfabeta, 2009). h. 5

pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia, kemudian tidak hanya mengeluarkan anggaran untuk memberikan kepada masyarakat yang kurang mampu tapi juga menyaipkan tenaga pekerja sosial yang dapat mendapingi masyarakat agar bantuan yang akan di peroleh nantinya mengarah kepada masyarakat yang kurang mampu tersebut.

Bukan hanya dalam hal mendampingi, tetapi pendamping juga di harapkan agar dapat melatih masyarakat tersebut dengan membantu memberikan pelatihan atau keterampilan kepada KPM agar dapat hidup layak sebagai mana mestinya.

Dengan demikian, evaluasi harus selalu dilakukan oleh pemerintah karena bagaimanapun program penanggulangan kemiskinan tetap harus dijalankan karena jumlah orang miskin makin hari makin bertambah.[9]

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengebangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, dimulai pada tahun 2007 pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat m iskin. Program serupa ini di negara lain dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) atau bantuan tunai bersyarat.[10]

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan strategis yang ditempuh oleh Kementerian Sosial selaku instansi pemerintah yang berkompeten dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial. PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, anak balita atau anak usia 5-18 tahun yang belum tamat pendidikan dasar.[11]

Dalam pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) sudah jelas disebutkan bahwan komponen yang menjadi fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan.

Tujuan utama PKH adalah memutus rantai kemiskinan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang dirancang untuk membantu RSTM pada sisi beban pengeluaran khusunya terkait

dengan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk jangka pendek dan memperbaiki pola pikir serta mengubah perilaku yang dapat membawa pada pemutusan rantai kemiskinan rumah tangga tersebut untuk jangka yang lebih panjang.[12]

Dari sisi manfaat, PKH akan memberikan manfaat jangka pendek yakni akan menambah pendapatan bagi individu-individu dalam Keluarga Penerima

[9] Prawoto, "MEMAHAMI KEMISKINAN DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA." h. 64

[10] Yudid B.STlonaen, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3 no 1 (2014). h. 29

[11] Himsar Silaban, "Tingkat Kapasitas Organisasi Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Gorontalo Berdasarkan Kisi-Kisi Penilaian Kapasitas Mckinsey," *Jurnal, Ilmu Dan Budaya* 40 (2016). h. 3

[12] Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Operasi Kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH)* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2013). h. 1

Manfaat (KPM) melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, sedangkan untuk jangka panjang, diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, gizi, pendidikan, dan kapasitas anak serta memberikan kepastian kepada anak akan masa depannya (insurance effect).[13]

Untuk memberikan keabsahan sistem perlindungan sosial di Indonesia pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Cukup jelas termaktub dalam Bab 1 Pasal 1 Butir 9 bahwa "Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan mengatasi resiko dan guncangan dan kerentanan sosial".[14]

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat pendamping yang merupakan aktor penting dalam mensukseskn Program PKH. Yang dimaksud peran pendamping adalah suatu tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga terkait dan diperlukan bagi pengembangan.

Pendamping PKH dibentuk disetiap Kecamatan yang terdapat peserta PKH. Pendamping PKH merupakan ujung tombak PKH karena unit ini berhubungan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang menekankan objek penelitiannya terhadap keunikan manusia atau gejala sosial yang tidak dapat dianalisis dengan metode statistik.[15]

Penelitian deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial dengan variabel pengamatan secara langsung yang sudah ditentukan secara jelas sistematis, faktual, akurat dan spesifik. Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih menekankan pada keaslian tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagai mana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar- benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu.[16]

HASIL PENELITIAN

Dalam hal ini proses dakwah struktural dalam pengembangan masyarakat Islam adalah dimana proses yang di lakukan oleh pemerintah daerah untuk melihat dan melakukan pengembangan terhadap masyarakatnya. Sesuai dengan tahapan yang dilakukan melalui Program Keluarga Harapan seperti:

1. Kondis Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi.

Jika di tinjau dari segi ekonomi tentunya jika berdasarkan harta benda dan tingkat pendapatan. Keberadaan masyarakat Desa Lakawali sudah termasuk kategori sejahtera, hal ini sesuai dengan penuturan dari aparat Desa yang menjadi informan dalam penelitian salah satunya menurut Muhammad Isnaen, sebagia mantan Sekertaris Desa Lakawali dalam

[13] Kementerian Sosial Republik Indonesia.
[14] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Bab 1, Pasal 1
[15] Sitti Mania, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial* (Makassar: Alauddin University Press, 2013). h. 38
[16] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Cet XIV (Jakarta: Alfabeta, 2006). h. 16

kurun waktu beberapa tahun terakhir sudah masuk dalam kategori sejahtera, karena berdasar kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) sudah mengalami penurunan yang drastis dari Rumah Tangga Miskin RTM yang sebelumnya berjumlah 515 kepala keluarga menjadi 319 kepala keluarga, dengan jumlah penduduk 961 jiwa.

Karena menurut beliau Kesejahteraan adalah terpenuhinya segala kebutuhan yang diperlukan baik kebutuhan sandang, pangan dan papan. Berikut perkataan dari Muhammad Isnaen:

"Jika kita lihat dari segi luar pada Desa Lakawali ini kita bisa lihat bahwa desa ini sudah sejahtera, tapi jika kita tinjau lebih dalam lagi ternyata masih banyak yang tergolong masyarakat kurang mampu dan itu di akaibatkan kurangnya lapangan pekerjaaan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari"[17]

Sama halnya yang dikatakan oleh Budiman masyarakat Desa Lakawali bahwa dalam perspektif ekonomi masyarakat sangat kurang, ditambah dengan ketidakpunya pekerjaan sebagian besar masyarakat, sehingga dalam kebutuhan hidupnya itu masih membutuhkan, salah satunya dengan pekerjaan menjadi tukang cuci ibu rumah tangga. Berikut perkataannya:

"Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya bekerja sebagai tukang cuci ibu rumah tangga, karena tidak adanya pekerjaan yang pas untuk saya lakukan sehngga itulah pekerjaan yang dapat saya kerja, sebab saya hanya tamatan SD".[18]

Lain pula dengan tanggapan Muh. Yamin bahwa ada beberapa bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu atau tidak mempunyai pekerjaan, sehingga mereka biasa mengelolahnya dengan baik. Berikut pernyataannya:

"*Jadi saya sampaikan kepada masyarakat bahwa dana hiba ini kami buatkan proposal untuk masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan seperti bantuan sapi, itik, bibit rumput laut dan lain-lain, mudah-mudahan desa kita ini bias sejahtera"*.[19]

Dari beberapa dokumen yang diperoleh bahwa memegang dari segi ekonomi banyak sekali faktor penunjang, sehingga dapat memperkuat beberapa pernyataan dari informan di atas. Dari segi ekonomi masyarakat Desa Lakawali mempunyai ragam mata pencarian. Penduduk desa ini mayoritas adalah petani tambak, karena luasnya area tambak yang mengelilingi desa mereka. Berdasarkan dokumen yang didapat dikantor desa bahwa desa ini memiliki perkebunan seluas 2023 Ha. selain lahan tambak di desa ini tercatat ada sekitar 177 ekor sapi, 653 ekor kambing, 1130 ekor babi, 24 ekor kelinci dan 20.080 ekor unggas yang kesemuanya adalah milik warga Desa Lakawali.[20]

2. Pengembangan Masyarakat Islam dalam Pemberian Pelayanan Pendidikan Terhadap PKH..

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan

[17] Muhammad Isnaen, (umur 32 tahaun), Mantan Sekertaris Desa Lakawali, Wawancara Kantor Desa Lakawali, 02 Februari 2020.
[18] Maryani, (umur 43 tahun), Masyarakat Desa Lakawali, Wawancara, Desa Lakawali, 05 Februari 2020.
[19] Muh. Yamin, (umur 39 tahun), Kepala Desa Lakawali, Wawancara Kantor Desa Lakawali, 03 Februari 2020.
[20] Kantor Desa Lakawali, Data Potensi Desa Lakawali 2015, (Lakawali 01 Februari 2020).

faktor utama keberhasilan pembangunan disuatu daerah. Program Keluarga Harapan dibidang pendidikan dimana untuk meningkatkan status pendidikan, khususnya masyarakat desa Lakawali yang tidak Mampu.

Tabel 1.0
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	SD	38
2	SMP/Sederajat	35
3	SMA/Sederajat	40
	Jumlah	113

Sumber: Data peserta Program Keluarga Harapan bidang Pendidikan Tahun 2020

Berdasarkan dari tabel di atas, jumlah pendidikan Keluarga Penerima Manfaat di Tahun 2020 tercatat 113 siswa yang terdiri dari SD yang berjumlah 38 siswa, SMP berjumlah 35 siswa, dan SMA berjumlah 40 siswa.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan masyarakat Desa Lakawali dapat merubah pola pikirnnya agar bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita katahui bahwa pendidikan sangatlah penting, oleh sebab itu Program Keluarga Harapan mewajibkan pendidikan dasar 12 tahun, dan khususnya bagi Keluarga Penerima Manfaat agar dapat mengurangi angka pekerja anak. Ada persyaratan dalam komponen PKH yang dimana mendaftarkan peserta didik dan memenuhi jumlah yang ditetapkan dalam program ini.

Bantuan yang diberikan ini akan terus diberikan kepada keluarga penerima manfaat jika memenuhi persyaratan sebagai peserta didik yaitu menghadiri dan mengikuti proses pembelajaran minimal 85% dalam sebulan selama satu tahun pembelajaran berlangsung. Dengan demikian diharapkan program pendidikan ini masyarakat miskin atau kurang mampu ini bisa memanfaatkan dengan baik sehingga menjadi generasi yang lebih baik.

3. Kondis Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Kesehatan.

Program Keluarga Harapan dalam bidang kesehatan masyarakat bagi keluarga penerima manfaat dimana dalam hal ini yaitu Ibu hamil, ibu Nifas, ibu yang mempunyai balita dan apras mensyaratkan untuk melakukan kunjungan rutin ke berbagai sarana kesehatan, seperti Puskesmas, Posyandu, atau bidan, dan untuk sarana kesehatan tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Tabel 1.1
Komponen Kesehatan

No	Kesehatan	Jumlah
1	Ibu Hamil	4
2	Balita	50
3	Anak Pra Sekolah	25
	Jumlah	79

Sumber : Data Peserta Program Keluarga harapan Bidang Kesehatan tahun 2020

Keterangan dari tabel di atas bahwa keluarga penerima manfaat pada program keluarga harapan dalam bidang kesehatan di tahun 2020 berjumlah 79 orang dimana diantaranya Ibu Hamil sebanyak 4 orang, Balita 50 orang, dan Apras 25 orang.

Dalam hal ini peneliti mengemukakan pendapat Kordinator dan Pendamping mengenai PKH di Desa Lakawali. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Munawir dan Pak Iksan.

Munawir Selaku Kordinator PKH Kabupaten Luwu Timur mengemukakan:

"Dengan adanya PKH masyarakat yang semula yang tidak dapat membiayai anaknya untuk sekolah dan memeriksakan kesehatan bagi ibu hamil, Ibu nifas, dan balita, dengan adanya Program Keluarga Harapan masyarakat bisa menyekolahkan anaknya dan memeriksakan kesehatannya. Dan program ini sangat membantu sekali perekonomian masyarakat yang kurang mampu".[21]

Pemeriksaan kesehatan ini di lakukan bertujuan untuk pencegahan dan pengobatan untuk yang mempunyai komponen Kesehatan seperti Ibu Hamil, Balita, dan Anak Pra Sekolah, ini di lakukan untuk melihat generasi yang sehat dan tanpa adanya anak yang Gizi Buruk. Pendapat lain yang di ungkapkan oleh

Pak Iksan bahwa:

"Program Keluarga Harapan itu adalah upaya atau cara pemerintah untuk membantu pengentasan kemiskinan. Dengan adanya program dari pemerintah seperti PKH ini bertujuan untuk memberikan setidaknya bantuan kepada masyarakat walaupun bantuan PKH ini tidak sepenuhnya dan seutuhnya dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan bantuan ini untuk masyarakat yang keluarganya mempunyai komponen atau beban-beban contohnya seperti mempunyai anak sekolah, mempunyai anak balita, Ibu Hamil, dan Apras, dan Insyaallah seperti yang saya sebutkan tadi merka akan mendapatkan bantuan tersebut".[22]

Pengembangan Program Keluarga Harapan di Desa Lakawali dalam bidang kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu hamil, anak balita dan apras khususnya bagi kelompok masyarakat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan bersifat preventif (pencegahan, dan pengobatan) dalam hal ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Lakawali turut hadir dalam kegiatan Posyandu atau berkunjung ke Puskesmas atau layanan kesehatan terdekat.

Oleh karena itu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di dorong untuk memiliki akses pelayanan sosial dasar pendidikan dan kesehatan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara bekelanjutan. PKH disarankan untuk menjadi penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial.

Selain itu pendapat lain dari Ibu Ratiem selaku Penerima PKH mengatakan bahwa:

"PKH itu bantuan yang diberikan untuk anak sekolah yang dimana untuk menyelesaikan masalah biaya pendidikan tersebut seperti semua kelengkapan sekolah yang di butuhkan sama halnya juga dengan kesehatan dimana untuk seluruh keperluan kesehatan, jadi saya sangat merasa bersyukur sekali pak dengan adanya bantuan PKH ini sehingga anak saya bisa lanjut pendidikannya dan sehat.".[23]

[21] Munawir, Kordinartor PKH (Umur 32 Tahun), Wawancara, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21 Januari 2020.

[22] Iksan Muis (Umur 28 Tahun), Pendamping Sosial PKH, Wawancara, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 30 Januari 2020.

[23] Ratiem (Umur 62), Keluarga Penerima Manfaat, Wawancara, Desal Lakawali, 25 Januari 2020.

Pelayanan kesehatan yang di dapatkan oleh peserta PKH haruslah lebih baik karena kita ketahui bahwa orang penerima bantuan ini tidak semuanya paham bagaimana akan kondisi kesehatan yang baik bagi dirinya dan keluarganya, sehingga pelayannya yang di dapatkan oleh peserta PKH ini harus lebih baik. Adapula pendapat lain dari Ibu Ayu yang dimana mengatakan bahwa:

"Dengan Adanya PKH saya merasa terbantu pak karena saya masih hamil sampai melahirkan semua biaya pemeriksaan ditanggung dari adanya bantuan PKH ini, dan setelah saya lahir saya bantuan saya pun masih berlanjut tapi bukan dari kategori hamil lagi tapi melainkan untuk balita saya lagi agar bayi saya nanti bisa sehat dan tidak terkena penyakit kurang gizi. Jadi bantuan ini bisa membantu perekonomian saya pak, dan untuk penghasilan suami saya bisa saya pergunakan untuk keperluan saya sehari-hari".[24]

Berdasarkan data yang di peroleh peneliti, dan di buktikan dengan data observasi maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya PKH ini bisa membantu meringankan perekonomian, beban pendidikan dan kesehatan. Meskipun tidak seutuhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, akan tetapi setidaknya dapat meringankan sedikit beban masyarakat yang membutuhkan. Dari hasil peneliti telah terlihat bahwasanya semangat orang tua untuk menyekolahkan dan menjaga kesehatan anaknya agar bisa menjadi penerus bangsa nantinya dan suatu saat nanti bisa lebih sejahtera dikemudian hari.

Selain itu juga dalam Pengembangan Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan tidak menutup kemungkinan ada kendala-kendala yang dihadapai dalam proses yang di lakukan melalui dakwah kolektif yang dilakukan, dakwah kolektif yang sangat berperan dalam penelitian ini adalah pendamping sosial itu sendiri di karenakan pendamping itu sendirilah yang sering dan

berhadapan langsung dengan masyarakat yang khususnya bagi penerima keluarga harapan di Desa Lakawali ini. Menurut pendapat oleh Pak Iksan Muis selaku pendamping sosial ada bebrapa kendala yang di hadapi ketika kita turun langsung di lapangan di antaranya:

Kendala ini terjadi di akibatkan karena tertutupnya mereka terhadap masalah yang terjadi sehingga proses penyelesaian masalah yang akan di lakukan itu terlambat.

Berikut penyataannya oleh pak Iksan Muis mengemukakan:

".....Salah satu kendala yang kami hadapi diantaranya seperti kendala yang kecil yang terjadi ketika peserta PKH itu tidak aktif berkomunikasi dengan kami sebagai pendamping, sehingga kami tidak mengerti apa masalah yang dia hadapi dalam program keluarga harapan ini, sehingga kita juga tidak tau bagaimana cara untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi".[25]

[24] Ayu Dewa (Umur 48 Tahun) Keluarga Penerima Manfaat, Wawancar, Desa Lakawali, 07 Februari 2020.

[25] Iksan Muis (Umur 28 Tahun), Pendamping Sosial PKH, Wawancara, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 30 Januari 2020.

Komunikasi yang tidak efektif adalah salah satu kendala yang terjadi di karenakan komunikasi yang terjalin ketika ada permasalahan yang terjadi dalam diri setiap manusia.

Pendapat lain disampaikan oleh Ibu Ayu Dewa yang mengatakan bahwa:

"..... kendala yang saya dapat itu ketika banyak anggota KPM bertanya tentang bantuan yang sudah masuk itu apa sudah boleh diambil atau belum, kemudian kalau ada sesuatu yang bermasalah baik itu dari segi bantuan yang masuk atau kartu mereka yang rusak itu bertanyanya langsung ke saya, padahal sudah sering kali di sampaikan sama kita semua kalau ada masalah apa-apa tentang PKH bisa langsung ditanyakan sama pendampingnya, dan dia bertanya sama saya pak karena malu atau takut cerita dengan pendamping kami pak".[26]

Kurangnya keterbukaan kepada peserta PKH terhadap pendampingnya sehingga kejadian yang terjadi dalam dirinya itu melibatkan seseorang untuk

mewakili penyampaian dari masalah mereka yang di hadapi. Kemudian pendapat dari Pak Munawir yang mengatakan bahwa:

"..... adanya permintaan data secara tiba-tiba dan dalam waktu yang singkat, sehingga kami dan para pendamping harus kembali bekerja ekstra lebih cepat, dan itu juga agak sulit lagi ketika data yang kami minta kepada peserta PKH itu sendiri tidak berada di tempat atau berada di kebun atau di sawah, jadi butuh satu hari lagi menunggu untuk berhadapan dengan KPM tersebut".[27]

Berdasarkan dari hasil wawancara oleh peneliti dapat di simpulkan bahwa ada beberapa kendala yang di hadapi ketika melaksanakan pekerjaan atau tugas di lapangan diantaranya:

1. Komunikasi yang tidak efektif, kendala ini terjadi di karenakan orang yang mempunyai masalah dalam hal ini sangat tertutup di karenakan ketakutan akan salah ketika memberikan pertanyaan kepada pendamping tersebut.

2. Kurangnya transparansi, masalah ini terjadi karena tidak adanya jadwal atau waktu yang tetap pada waktu penyaluran sehingga masyarakat selalu terjadi masalah pada bantuannya, seperti bantuan tidak terjadwal di sehingga setiap hari untuk mengecek isi bantuannya.

Proses dakwah struktural yang dilakukan oleh pendamping dan kordinator kabupaten terhadap masyarakat penerima manfaat telah terjalin dan berjalan sesuai dengan aturan pemerintah pusat kepada pengaplikasian Pengembangan Masyarakat Islam berbasis Program Keluarga Harapan, walaupun banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam setiap melaksanakan pekerjaan yang dia kerjakan demi mencapainya masyarakat yang mandiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Lakawali mengenai Pengembangan Masyarakat Islam Berbasis Program Keluarga Harapan (PKH), maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

Aplikasi Pengembangan Masyarakat Islam Terhadap Program Keluarga Harapan

[26] Ayu Dewa (Umur 48 Tahun), Keluarga Penerima Manfaat, Wawancara, Desa Lakwali, 07 Februari 2020.

[27] Munawir (Uur 32 Tahun), Kordinartor PKH, Wawancara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21 Januari 2020.

(PKH) di Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, dimana proses tersebut yang di lakukan oleh pemerintah melalui pendamping sosial kepada keluarga penerima manfaat. Kemudian melalui pengembangan masyarakat itu salah satu upaya untuk memperluas atau meningkatkan atau dapat mengubah potensi-potensi yang ada dalam suatu masyarakat ke suatu keadaan yang lebih lengkap, lebih besar, dan lebih baik dari keadaan sebelumnya. Jadi pengembangan masyarakat adalah proses dakwah kolektif masyarakat dalam meningkatkan kondisi hidup baik itu ekonomi, sosial, lingkungan dan aspek kehidupan lainnya agar dapat menjadi lebih baik dengan membentuk partisipasi dan semangat swadaya masyarakat dalam kondisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

B.STlonaen, Yudid. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3 no 1 (2014).

Dwiantika, Nina. "Kredit Usaha Tani Dihapus Bagaimana Nasib BRI." 28 Agustus 2012, 2012. https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-usaha-tani-dihapus-bagaimana-nasib-bri.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Operasi Kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2013.

Mania, Sitti. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

"Pengertian Dan Tujuan," 2019. http://www.pnpm-mandiri.org/PengertiandanTujuan.html.

Prawoto, Nano. "MEMAHAMI KEMISKINAN DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA." *Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 9 (2008). https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/issue/view/195.

Silaban, Himsar. "Tingkat Kapasitas Organisasi Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Gorontalo Berdasarkan Kisi-Kisi Penilaian Kapasitas Mckinsey." *Jurnal, Ilmu Dan Budaya* 40 (2016).

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Cet XIV. Jakarta: Alfabeta, 2006.

Suharto, Edi. *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2009.

———. *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*. Cet I. Bandung: Alfabeta, 2009.